

Proyek Tol Bali Sudah Telan Biaya Rp 1 Triliun

Oleh Eko Adityo Nugroho

► JAKARTA – Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol Akhmad Tito Karim mengatakan, dana yang telah digunakan untuk pembangunan jalan tol layang Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa mencapai Rp 1,05 triliun atau 70% dari biaya konstruksi sebesar Rp 1,51 triliun. Sedangkan total dana investasi pembangunan jalan tol ini mencapai Rp 2,48 triliun.

“Dana pembangunan digunakan untuk membiayai konstruksi jalan tol yang hingga kini telah mencapai 90%,” kata Tito saat dihubungi *Investor Daily* dari Jakarta, baru-baru ini.

Selain konstruksi, anggaran bakal digunakan untuk persiapan pengoperasian jalan tol tersebut. Di samping itu, dana dialokasikan untuk pembebasan lahan dan gaji pegawai.

Selaku pemegang konsesi tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa, PT Jasamarga Bali Tol saat ini tengah memfinalisasi pengerjaan jalan bebas hambatan tersebut.

“Kami sudah masuk tahap finalisasi pengerjaan jalan, berupa pengaspalan, pemasangan rambu lalu lintas dan penerangan jalan, serta pembuatan gardu tol,” jelas dia.

Kendati demikian, lanjut dia, saat ini masih terdapat pengerjaan jembatan sepanjang 150 meter di paket dua yang diselesaikan. Jembatan itu dibuat agar perahu-perahu yang lalu lalang di bawah jalan tol ini tidak terganggu. “Penyelesaiannya juga membutuhkan waktu tidak terlalu lama,” ucap dia.

Tito juga memastikan proyek jalan tol ini dapat selesai pada Juni-Juli 2013 sebelum diuji kelayakannya oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Selanjutnya, jalan bebas hambatan ini dapat digunakan untuk mendukung penye-

lenggaraan KTT APEC di Bali pada Oktober 2013.

JLJ Terpilih

Dihubungi terpisah, *Public Relation Officer* PT Jasamarga Bali Tol Dradjad H Suseno menambahkan, perseroan telah menentukan operator penyelenggara jalan tol ini, yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) melalui proses tender. Penandatanganan perjanjian kerja sama jasa layanan transaksi dan lalu lintas jalan tol ini ditandatangani, Kamis (18/4).

“Kami telah menyurati seluruh operator jalan tol di Indonesia, ternyata kebanyakan perusahaan *outsourcing* (alih daya). Yang memenuhi kualifikasi hanya lima, lalu kelimanya diundang, tapi hanya tiga yang memasukkan penawaran,” ujar dia.

Dradjad menambahkan, dari ketiga penawaran yang masuk, ternyata JLJ menduduki peringkat tertinggi. Apalagi, perusahaan itu juga berpengalaman dalam mengelola jalan tol, di antaranya jalan tol Serpong, tol Cinere-Jagorawi, dan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

“Selama 12 tahun ini, mereka telah mengelola jalan tol kurang lebih 56 kilometer. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa mereka layak menangani tol Bali,” jelas dia.

Sementara itu Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta Seprianto Sanaf mengatakan, jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa merupakan ruas jalan tol keempat yang akan dioperasikan JLJ. Perusahaan akan mengoperasikan jalan tol ini selama tiga tahun.

“Kami memperoleh kontrak jasa layanan transaksi dan layanan lalu lintas selama tiga tahun. Kami juga akan memiliki pengalaman baru mengoperasikan jalan tol di atas laut,” imbuh dia.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, pengoperasian jalan tol ini harus sesuai rencana yang telah ditetapkan, yakni tuntas sebelum forum APEC digelar. Sebab, jalan tol Bali akan menjadi salah satu infrastruktur penunjang kegiatan tersebut.

“Setidaknya Juni atau sebelum Oktober, jalan sudah harus dioperasikan,” papar dia.

Djoko juga tidak terlalu memperlakukan perubahan kepemilikan saham di badan usaha jalan tol (BUJT) pemegang konsesi tol Bali. Saat ini kepemilikan saham PT Jasamarga Bali Tol berubah setelah PT Wijaya Karya keluar dari perusahaan itu.

“Yang penting, jalan selesai dibangun. Tapi perubahan itu tetap mesti dilaporkan,” kata dia.

Posisi Wijaya Karya di PT Jasamarga Bali Tol digantikan oleh Pemprov Bali dan Pemkab Badung dengan masing-masing kepemilikan saham 8,01%.

Dengan masuknya dua investor baru itu, komposisi kepemilikan saham yang berubah antara lain PT Jasa Marga berkurang menjadi 55% dari sebelumnya 60%, PT Pelindo III menjadi 17,98% dari sebelumnya 20%, PT Angkasa Pura I menjadi 8% dari sebelumnya 10%. Kemudian kepemilikan saham PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya masing-masing menjadi 1% dari sebelumnya sebesar 2%. Sementara itu, PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap memiliki saham 1%.